



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KOTA PEKANBARU DALAM PENGAWASAN TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KECAMATAN TAMPAN

Oleh :

Dimas Irawan
11375106423

Penelitian ini berjudul Analisis peran dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru dalam pengawasan terhadap izin mendirikan bangunan di kecamatan Tampan. Latar belakang penelitian ini adalah karena masih banyaknya dijumpai bangunan - bangunan yang melakukan pelanggaran maupun yang belum memiliki IMB yang berada di kecamatan Tampan. penelitian ini dilakukan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran DPM-PTSP kota Pekanbaru dalam mengawasi izin mendirikan bangunan di kecamatan Tampan dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan tersebut. Konsep Operasional dalam penelitian ini menggunakan teori T. Hani handoko yaitu : pengawasan pendahuluan, pengawasan secara bersamaan, dan pengawasan umpan balik. Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan hasil penelitian dan menganalisa sehingga diperoleh hasil dan kemudian menyimpulkannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPM-PTSP terhadap kegiatan izin mendirikan bangunan belum berjalan secara optimal. Adapun yang menjadi penghambat dalam pengawasan tersebut adalah : masih kurangnya SDM dari segi kuantitas yang dimiliki, kurangnya mobil operasional, kurang koordinasi yang dilakukan dengan pihak kecamatan maupun kelurahan dalam melakukan pengawasan, kurangnya sosialisasi yang dilakukan mengenai peraturan IMB, serta kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat tentang IMB tersebut .

Kata Kunci : Pengawasan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB).